

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPPGN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KOTA MAKASSAR

Jamal Andi^{1)*}, Andi Irwan Kasim^{2)*} Abd. Gaffar^{3)*}

¹. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

². Program Studi Manajemen, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

³. Program Studi Akuntansi, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

^{1, 2, 3}. Email: jamal.andiupri@gmail.com, irwankasim.feuvrimks@gmail.com,
abdgaaffar.gani@gmail.com,

*Correspondent Email: jamal.andiupri@gmail.com

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah. Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat ditentukan oleh tata kelola dan manajemen organisasi pelaksana di tingkat daerah, salah satunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPGN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dan manajemen SPPGN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur SPPGN serta perangkat daerah terkait. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola SPPGN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas dan responsivitas pelayanan. Namun demikian, aspek transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan masih belum optimal. Dari sisi manajemen, SPPGN telah melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta sistem evaluasi kinerja yang belum berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola dan manajemen SPPGN melalui peningkatan transparansi, penguatan koordinasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah.

Kata kunci: tata kelola, manajemen publik, SPPGN, Program Makan Bergizi Gratis, pelayanan publik.

ABSTRACT

The Free Nutritional Meal Program (MBG) is a strategic government policy aimed at improving the nutritional quality of the community, particularly school-age children. The success of this program's implementation is largely determined by the governance and management of implementing organizations at the regional level, one of which is the National Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPGN). This study aims to analyze the governance and management of SPPGN in implementing the Free Nutritional Meal Program in Makassar City. This study used a qualitative approach with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of SPPGN officials and related regional agencies. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that SPPGN governance in implementing the Free Nutritional Meal Program has been implemented in accordance with the principles of good governance, particularly accountability and responsiveness of service. However, transparency and stakeholder participation remain suboptimal. From a management perspective, SPPGN has carried out its planning, organizing, implementation, and monitoring functions, although it still faces challenges such as limited resources, suboptimal cross-sectoral coordination, and a less than sustainable performance evaluation system. This study recommends strengthening the governance and management of the Free Nutritional Meal Program (SPPGN) through increased transparency, enhanced coordination, and human resource capacity development to support the success of the Free Nutritional Meal Program at the regional level.

Keywords: *governance, public management, SPPGN, Free Nutritional Meal Program, public services.*

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi negara, pembangunan sumber daya manusia menempati posisi strategis karena manusia tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama pembangunan. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi, terutama pada kelompok usia anak dan remaja yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah di bidang pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing bangsa.

Permasalahan gizi masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia sekolah. Berbagai studi menunjukkan bahwa kekurangan gizi dapat berdampak pada rendahnya konsentrasi belajar, menurunnya prestasi akademik, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan jangka panjang (UNICEF, 2021). Dalam konteks tersebut, pemerintah menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan strategis untuk menjamin pemenuhan gizi dasar bagi anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipahami sebagai program sosial, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor serta sumber daya. Dunn (2018) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikelola dan diimplementasikan di tingkat operasional. Dengan demikian, aspek tata kelola dan manajemen menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah membentuk Satuan Pelaksana Program Gizi Nasional (SPPGN) sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas operasional program di daerah. SPPGN memiliki peran strategis dalam mengelola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Namun demikian, keberadaan SPPGN tidak terlepas dari tantangan tata kelola, terutama terkait koordinasi lintas sektor, pembagian kewenangan, serta akuntabilitas pengelolaan program.

Konsep tata kelola (governance) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan publik. Menurut Rhodes (1996), governance mencerminkan pola interaksi antaraktor yang saling bergantung dalam mengelola sumber daya publik. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, tata kelola yang baik menuntut adanya koordinasi yang efektif antara SPPGN, dinas pendidikan, dinas kesehatan, pihak sekolah, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Tanpa tata kelola yang jelas dan terkoordinasi, program berpotensi mengalami inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, dan penurunan kualitas layanan.

Selain tata kelola, aspek manajemen publik juga memegang peranan penting dalam keberhasilan program. Terry dan Rue (2014) menjelaskan bahwa manajemen mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, manajemen yang lemah dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran, kualitas makanan yang tidak terstandar, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, pengelolaan SPPGN harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem kerja yang terstruktur, serta mekanisme evaluasi yang berorientasi pada hasil dan dampak.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji tata kelola dan manajemen SPPGN. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur, Kota Makassar memiliki karakteristik sosial dan demografis yang beragam. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar melibatkan banyak sekolah dan penerima manfaat, sehingga kompleksitas pengelolaan program menjadi semakin tinggi. Kondisi ini menuntut tata kelola dan manajemen yang adaptif, responsif, dan akuntabel.

Beberapa temuan awal di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, seperti koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia pengelola, serta belum maksimalnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Padahal, menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan program publik yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tata kelola dan manajemen SPPGN dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana tata kelola dan manajemen program dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian administrasi negara, serta menjadi bahan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis tata kelola dan manajemen Satuan Pelaksana Program Gizi Nasional (SPPGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, aktor, serta dinamika implementasi program di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Makassar dengan pertimbangan sebagai salah satu daerah pelaksana Program Makan Bergizi Gratis dengan cakupan penerima manfaat yang luas.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, meliputi pengelola SPPGN, aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan program, pihak sekolah, serta perwakilan penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap pelaksanaan program, serta studi dokumentasi berupa kebijakan, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SPPGN dan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPGN) di Kota Makassar adalah bagian penting yang dibuat untuk membantu jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai aturan utama negara dalam hal pemenuhan gizi. SPPGN bertugas memastikan bahwa semua tahapan, mulai dari merencanakan, menyiapkan, hingga menyalurkan makanan bergizi kepada orang yang berhak, berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saat bekerja, SPPGN bekerja sama dengan berbagai bagian daerah yang terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan juga sekolah sebagai penerima manfaat langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa susunan SPPGN di Kota Makassar sudah memiliki pembagian tugas dan fungsi yang cukup terstruktur. Tetapi, dalam kenyataannya, kerumitan wilayah perkotaan dengan banyaknya orang yang dituju membutuhkan kemampuan pengelolaan dan pengaturan yang lebih fleksibel. Hal ini sesuai dengan pendapat Rondinelli (2006) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah perkotaan punya masalah pelaksanaan aturan yang lebih rumit dibanding daerah pedesaan, terutama soal kerja sama dan pengelolaan sumber daya.

Tata Kelola SPPGN dalam Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan temuan lapangan, tata kelola SPPGN dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Dari sisi akuntabilitas, SPPGN telah melaksanakan pelaporan kegiatan secara berkala kepada instansi terkait di tingkat kota. Pelaporan ini mencakup jumlah penerima manfaat, distribusi makanan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Praktik ini mencerminkan upaya SPPGN dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada pemerintah daerah dan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2012) bahwa akuntabilitas merupakan indikator utama kualitas tata kelola pelayanan publik.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek transparansi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai mekanisme program, standar pelayanan, dan alur pengaduan belum sepenuhnya tersosialisasi secara luas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan UNDP (1997) yang menegaskan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan pelaporan internal, tetapi juga dengan akses publik terhadap informasi kebijakan dan pelayanan.

Dari sisi partisipasi, keterlibatan pemangku kepentingan seperti sekolah dan masyarakat sudah mulai terlihat, terutama dalam proses penerimaan dan evaluasi layanan. Namun, partisipasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum terstruktur secara sistematis. Padahal, menurut Osborne (2006), paradigma pelayanan publik modern menuntut adanya keterlibatan aktif warga negara sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan.

Responsivitas SPPGN dalam menangani permasalahan lapangan, seperti keterlambatan distribusi atau penyesuaian jumlah sasaran, dinilai cukup baik oleh informan. Aparatur SPPGN berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kondisi lapangan, meskipun sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola SPPGN telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar prinsip *good governance* dapat diterapkan secara optimal.

Manajemen SPPGN dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Dari sisi pengelolaan, hasil studi tunjukkan SPPGN di Kota Makassar sudah jalankan fungsi pengelolaan yang meliputi rancangan, penataan, penerapan, serta pengawasan, meski belum sepenuhnya maksimal. Pada bagian rancangan, SPPGN buat rencana kerja sesuai panduan umum Program MBG serta keadaan kebutuhan di lapangan. Rancangan ini meliputi penentuan tujuan, jadwal pembagian, serta keperluan logistik. Akan tetapi, kurangnya data yang tepat dan terbaru sering menjadi masalah dalam membuat rancangan yang tepat sasaran. Hal ini sesuai

pendapat Terry (2012) yang menekankan bahwa rancangan yang efektif harus didukung data serta informasi yang cukup

Pada bagian penataan, SPPGN sudah punya susunan kerja serta pembagian tugas yang jelas. Namun, kerja sama antar unit serta antar instansi masih jadi tantangan utama. Beberapa sumber info ungkapkan bahwa beda pandangan serta alur kerja sama dengan perangkat daerah terkait sering memperlambat proses pelayanan. Keadaan ini tunjukkan kurangnya gabungan pengelolaan, seperti yang dikatakan Wibowo (2016) bahwa bagusya pengelolaan publik sangat tergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun kerja sama serta kerja sama lintas bidang.

Penerapan Program MBG oleh SPPGN secara umum berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Petugas SPPGN berusaha jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, meski beban kerja yang cukup tinggi. Dalam hal ini, hasil kerja petugas tidak hanya dipengaruhi sistem pengelolaan, tetapi juga oleh janji serta profesionalisme pribadi. Siagian (2014) tegaskan bahwa keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan kualitas pengelolaan sumber daya manusia yang dipunyainya.

Fungsi pengawasan menjadi penilaian yang masih perlu diperkuat. Pengawasan internal sudah dilakukan, tetapi cara penilaian hasil kerja secara terus-menerus belum berjalan secara sistematis. Penilaian lebih banyak bersifat administratif daripada mendalam. Padahal, menurut Dunn (2018), penilaian kebijakan merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola dan Manajemen SPPGN

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut Edwards III (1980), faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung internal meliputi komitmen pengelola SPPGN dan dukungan anggaran pemerintah. Komitmen aparatur ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menekankan pentingnya sikap dan komitmen pelaksana kebijakan.

Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan SDM, lemahnya sistem manajemen, serta kurangnya sarana prasarana pendukung. Dari sisi eksternal, koordinasi lintas sektor yang belum optimal dan dinamika kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan program masih rendah. Padahal, menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam tata kelola demokratis untuk memastikan akuntabilitas program publik

Implikasi Tata Kelola dan Manajemen terhadap Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis

Tata kelola dan manajemen yang baik memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan program publik. Menurut Stoker (1998), *governance* yang efektif akan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam tata kelola dan manajemen SPPGN berpotensi menurunkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun kualitas layanan.

Sebaliknya, penguatan prinsip *good governance*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang berkelanjutan akan meningkatkan keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan pandangan Denhardt dan Denhardt (2015) yang menekankan bahwa pelayanan publik yang baik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dikelola secara profesional. Dengan demikian, perbaikan tata kelola dan manajemen SPPGN menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola dan manajemen Satuan Pelaksana Program Gizi Nasional (SPPGN) dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Tata kelola program masih menghadapi kendala dalam kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi lintas sektor, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dari sisi manajemen, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan lokal dan evaluasi dampak program.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola SPPGN melalui penetapan standar operasional prosedur yang jelas, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta perluasan akses informasi publik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan dampak, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Makassar

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Dwiyanto, A. (2012). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). Berkeley, CA: University of California Press.

Rondinelli, D. A. (2006). *Public administration and democratic governance: Governments serving citizens*. New York, NY: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Siagian, S. P. (2014). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Terry, G. R. (2012). *Principles of management* (12th ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York, NY: United Nations Development Programme.

Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja* (5th ed.). Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.